

ANALISIS KONSENTRASI KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

Hastarini Dwi Atmanti

*Fakultas Ekonomi UNDIP, Tembalang, Semarang,
(email :hastarini_dwi_atmanti@yahoo.com)*

Wiratno R Mulyo Hendaro

Fakultas Ekonomi UNDIP, Tembalang, Semarang,

Abstract

Poverty is a problem faced by all countries, especially developing countries. Problem of poverty is a complex, in terms of cause and views of its size. This is because poverty is multidimensional, meaning that all dimensions of poverty concerning human needs that are extremely diverse. In addition, the dimensions of the human needs of its diverse rose intertwined with one another. Central Java located between the provinces of West Java, DKI Jakarta and East Java provinces are "fast forward" through industrialization centered in the "Greater" and Surabaya. It is true that Java got the "transfer of wealth" (trickle down) from the neighboring provinces of progress, but at the same time also receiving a negative impact because a supplier of cheap labor is only enjoyed by those who leave the village. A number of poor people, concentrated in certain areas. There are several things that caused the concentration of poverty. Differences in the progress of development of an area would cause the income gap, which also would cause different levels of poverty. Based on the classification of the intensity distribution of poor population, show that in Central Java, there are several areas which classified high or very high. There are still many poor people in some areas. Based on entropy Theil index, in Central Java occur spatial concentration of economic activity. Small value index, which showed a small inequality and a large index value indicates greater inequality. The majority of urban areas more advanced than the district. Growth occurs only in some places that are centers of growth with different intensity.

Keywords: concentration of poverty

Latar Belakang Masalah

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan suatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dilihat dari ukurannya. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang sifatnya sangat beragam. Selain itu, dimensi kebutuhan manusia yang beraneka ragam itupun saling terkait satu dengan lainnya.

Demikian juga yang dialami di Jawa Tengah. Jawa Tengah "terjepit" di antara propinsi besar Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur, propinsi-propinsi tersebut "maju pesat" melalui industrialisasi yang berpusat di "Jabodetabek" dan Surabaya. Memang benar Jawa Tengah memperoleh "pelimpahan kemakmuran" (*trickle down*) dari kemajuan propinsi-propinsi tetangganya ini, tetapi pada saat yang sama juga menerima dampak negatif karena menjadi pemasok tenaga kerja murah yang hanya dinikmati mereka yang meninggalkan desanya. (Mubyarto, 2002)

Pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 8,8 juta atau sekitar 28,64 persen dari total penduduk Jawa Tengah. Garis kemiskinan pada tahun tersebut mencapai 75.579 rupiah per kapita. Jumlah penduduk miskin tahun 2002 menurun menjadi 7,3 (23,06 persen) dengan batas miskin sebesar 106,438 rupiah per kapita.

Jumlah penduduk miskin tahun 2005 menurun lagi menjadi 6,53 juta (20,49 persen) dengan batas miskin sebesar 130.013 rupiah per kapita per bulan. Pada tahun 2006 penduduk miskin naik menjadi 7,10 juta (22,19 persen) daya batas miskin 176.859 rupiah per kapita per bulan. Pada tahun 2007, jumlah keluarga pra sejahtera di Jawa Tengah mencapai 3,14 juta atau 34,46 persen dari total keluarga. (BPS, 2008)

Dari jumlah penduduk miskin tersebut, terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya konsentrasi kemiskinan. Perbedaan kemajuan pembangunan suatu wilayah akan menimbulkan kesenjangan pendapatan, yang sekaligus akan menimbulkan perbedaan tingkat kemiskinan. Pada umumnya, perkembangan ekonomi tidak terjadi secara serempak di semua sektor dan wilayah. Beberapa tumbuh dengan cepat, sedangkan beberapa sektor mengalami perkembangan yang lebih lambat. (Diana Wijayanti dan Heri Wahono, 2005)

Konsentrasi spasial kemiskinan sendiri memiliki definisi yang berbeda dengan kemiskinan yang konvensional. Kemiskinan konvensional adalah kemiskinan yang menunjuk pada individu/keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya atau membelanjakan lebih dari proporsi tertentu dari pendapatannya untuk mencapai standar hidup tertentu sedangkan konsentrasi spasial kemiskinan melihat tingkat kemiskinan pada suatu komunitas tertentu. Komunitas dapat disebut miskin jika lebih dari 20 persen populasinya orang miskin. Tingkat kemiskinan suatu komunitas ini memberikan informasi perbandingan antar wilayah seperti halnya perbandingan kemiskinan antar negara. (Ardyanto Fitriady, 2003 dalam Sunarwan Arif Wicaksana, 2007).

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah
Tahun 2002 - 2007

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)			Persentase Penduduk Miskin dari Jumlah Penduduk		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Kab. Cilacap	128671	135406	141840	22,25	24,93	22,59
Kab. Banyumas	152121	158253	164111	22,02	24,44	22,46
Kab. Purbalingga	144515	146178	148735	29,95	32,38	30,24
Kab. Banjarnegara	126543	136765	146531	27,35	29,40	27,18
Kab. Kebumen	137095	149986	162301	29,83	32,49	30,25
Kab. Purworejo	128427	138748	148607	22,77	22,75	20,49
Kab. Wonosobo	134488	139766	144809	31,68	34,43	32,29
Kab. Magelang	113279	120111	126638	15,42	17,36	17,37
Kab. Boyolali	120685	136787	152169	17,75	20,00	18,06
Kab. Klaten	180085	191910	203205	22,48	22,99	22,27
Kab. Sukoharjo	129392	145884	161638	13,67	15,63	14,02
Kab. Wonogiri	130016	137241	144144	25,21	27,01	24,44
Kab. Karanganyar	148987	156733	164134	16,14	18,69	17,39
Kab. Sragen	147361	158011	168185	24,28	23,72	21,24
Kab. Grobogan	138103	151133	163581	28,00	27,60	25,14
Kab. Blora	120701	126957	132933	21,73	23,95	21,46
Kab. Rembang	141530	152740	163449	30,72	33,20	30,71
Kab. Pati	159558	172821	185490	19,82	22,14	19,79
Kab. Kudus	156462	164758	172683	10,93	12,05	10,73

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)			Persentase Penduduk Miskin dari Jumlah Penduduk		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Kab. Jepara	155376	163028	170338	10,39	11,75	10,44
Kab. Demak	142593	155282	167405	23,60	26,03	23,5
Kab. Semarang	143695	150294	156597	13,16	13,62	12,34
Kab. Temanggung	111249	120580	129495	14,50	16,62	16,55
Kab. Kendal	140676	156491	171598	20,06	21,59	20,7
Kab. Batang	106644	118985	133680	18,15	19,99	20,79
Kab. Pekalongan	150604	161603	172110	20,47	22,80	20,31
Kab. Pemalang	128309	144570	160105	22,59	25,30	22,79
Kab. Tegal	140441	150438	159988	19,60	20,71	18,5
Kab. Brebes	137298	151922	165893	27,79	30,36	27,93
Kota Magelang	157233	167813	177920	12,94	11,19	10,01
Kota Surakarta	169956	183766	196959	13,34	15,21	13,64
Kota Salatiga	150584	161527	171722	8,81	8,90	9,01
Kota Semarang	162723	167404	171875	4,22	5,33	5,26
Kota Pekalongan	136266	144066	151517	6,37	7,38	6,62
Kota Tegal	171462	184872	197683	8,96	10,40	9,36
Jawa Tengah	130013	142337	154111	20,49	22,19	20,43

Sumber : BPS Prop. Jawa Tengah, 2008

Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, di Jawa Tengah terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah yang pada akhirnya akan menyebabkan kesenjangan antardaerah di Jawa Tengah semakin besar.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

Menganalisis distribusi penduduk miskin di Jawa Tengah dan menganalisis kesenjangan antar daerah di Jawa Tengah.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyebaran kegiatan ekonomi ke seluruh wilayah, sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi di tiap wilayah di Jawa Tengah.
2. Dari hasil penelitian ini, apabila terdapat daerah yang tertinggal, maka daerah tersebut dapat menjadi daerah binaan, sehingga penelitian ini berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Distribusi Penduduk Miskin di Jawa Tengah

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2002-2007 berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun. Sedangkan menurut persebarannya, persentase penduduk miskin di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Tabel 3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi Jawa Tengah 2002-2007

Tahun	Perkotaan		Perdesaan		Kota + Desa	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
2002	2762,28	20,50	4546,05	24,96	7308,33	23,06
2003	2520,30	19,66	4459,70	23,19	6980,00	21,78
2004	2346,50	17,52	4497,30	23,64	6843,80	21,11
2005	2671,20	17,24	3862,30	23,57	6533,50	20,49
2006	2958,10	18,90	4142,50	25,28	7100,60	22,19
2007	2687,30	17,23	3869,90	23,45	6557,20	20,43

Sumber : BPS, 2007

Tabel 4
Distribusi Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi Jawa Tengah 2002-2007

Tahun	Perkotaan		Pedesaan		Kota + Desa	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2002	2.762,28	37,80	4.546,05	62,20	7.308,33	100,00
2003	2.520,30	36,11	4.459,70	63,89	6.980,00	100,00
2004	2.346,50	34,29	4.497,30	65,71	6.843,80	100,00
2005	2.671,20	40,88	3.862,30	59,12	6.533,50	100,00
2006	2.958,10	41,66	4.142,50	58,34	7.100,60	100,00
2007	2.687,30	40,98	3.869,90	59,20	6.557,20	100,00

Sumber : BPS, 2007

Berdasarkan pada metode klasifikasi intensitas berdasarkan distribusi yang dikeluarkan oleh Tim KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), distribusi penduduk miskin di Jawa Tengah selama tahun penelitian 2002-2007 menunjukkan bahwa terdapat daerah yang masuk pada klasifikasi sangat tinggi selama tahun penelitian (Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Brebes), dan ada beberapa daerah yang masuk klasifikasi sangat rendah selama tahun penelitian (Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Tegal). Sedangkan daerah lain klasifikasinya lebih beragam. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

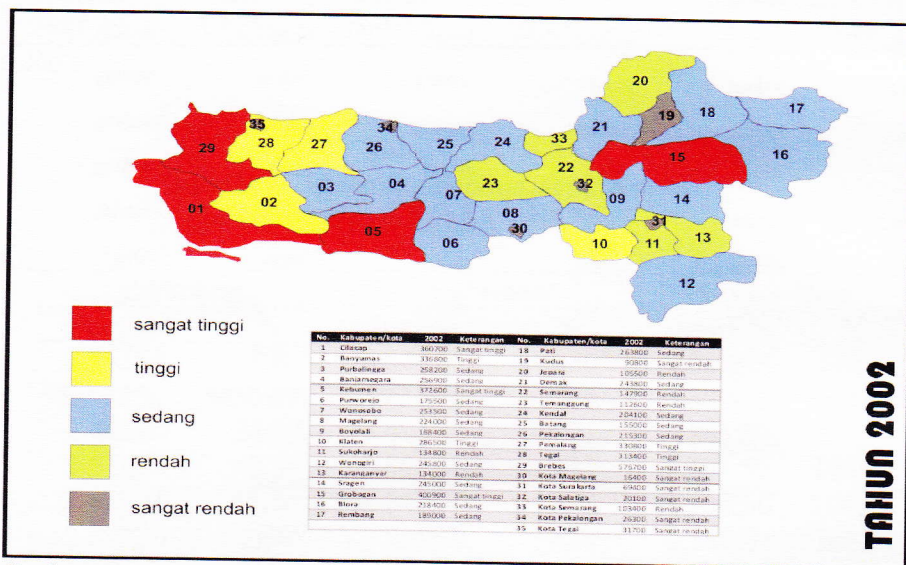
Tabel 5
Klasifikasi Intensitas Berdasarkan Distribusi

Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cilacap	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi
Banyumas	tinggi	tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi
Purbalingga	sedang	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
Banjarnegara	sedang	sedang	sedang	tinggi	sedang	tinggi
Kebumen	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi
Purworejo	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
Wonosobo	sedang	sedang	tinggi	tinggi	sedang	tinggi
Magelang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
Boyolali	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
Klaten	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	sedang	tinggi
Sukoharjo	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah
Wonogiri	sedang	sedang	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
Karanganyar	rendah	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
Sragen	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
Grobogan	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi
Blora	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
Rembang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
Pati	sedang	sedang	tinggi	tinggi	sedang	sedang
Kudus	sangat rendah	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah
Jepara	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah
Demak	sedang	sedang	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
Semarang	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah
Temanggung	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah
Kendal	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
Batang	sedang	sedang	sedang	sedang	rendah	sedang
Pekalongan	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
Pemalang	tinggi	sangat tinggi	tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi
Tegal	tinggi	tinggi	Tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
Brebes	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi
Kota Magelang	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
Kota Surakarta	sangat rendah	sangat rendah	Rendah	rendah	rendah	rendah
Kota Salatiga	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
Kota Semarang	rendah	rendah	rendah	sangat rendah	rendah	rendah
Kota Pekalongan	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
Kota Tegal	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah

Sumber : Data sekunder diolah, 2009

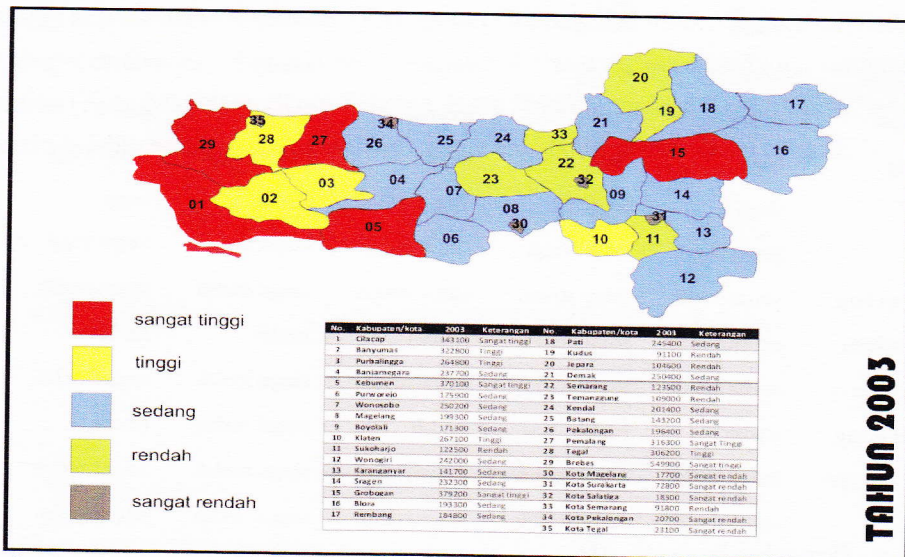
Berdasarkan pada tabel tersebut, beberapa daerah yang distribusi penduduk miskinnya masuk dalam klasifikasi tinggi hingga sangat tinggi. Bahkan pada awal tahun penelitian yang semula distribusi penduduk miskinnya masuk dalam klasifikasi sedang, pada pertengahan ataupun akhir tahun penelitian distribusi penduduk miskinnya masuk dalam klasifikasi tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana Wijayanti dan Heri Wahono (2005), hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah distribusi penduduk miskin masuk dalam klasifikasi sangat tinggi.

Gambar 1
Klasifikasi Intensitas Berdasarkan Distribusi
Tahun 2002



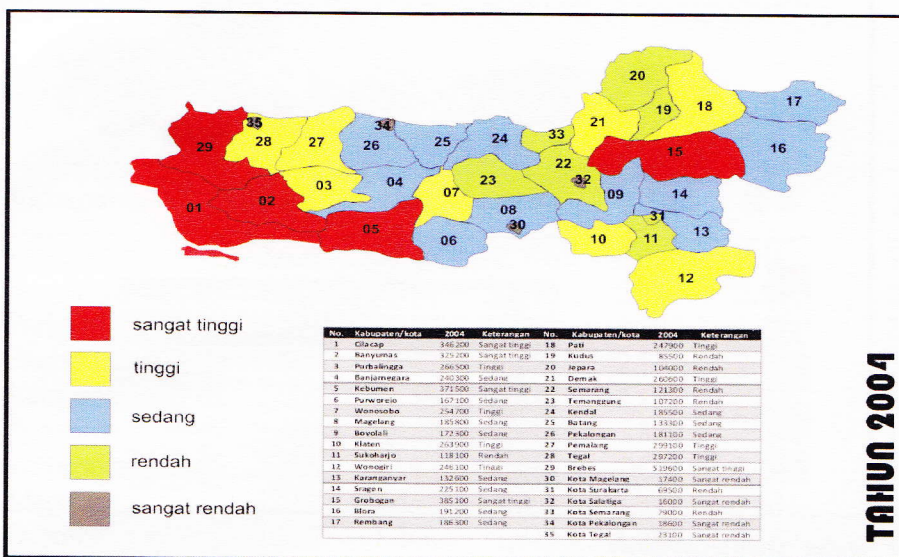
Sumber : Data sekunder diolah

Gambar 2
Klasifikasi Intensitas Berdasarkan Distribusi
Tahun 2003



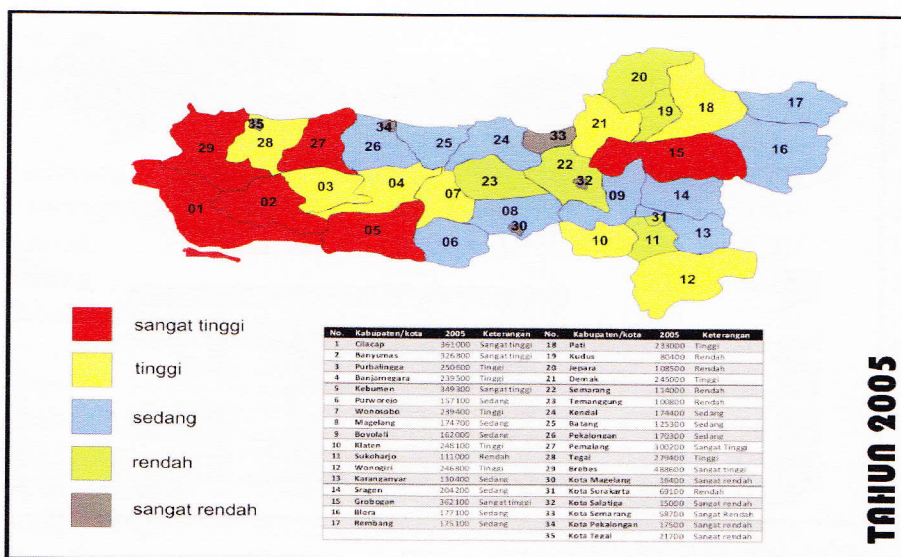
Sumber : Data sekunder diolah

Gambar 3
Klasifikasi Intensitas Berdasarkan Distribusi
Tahun 2004



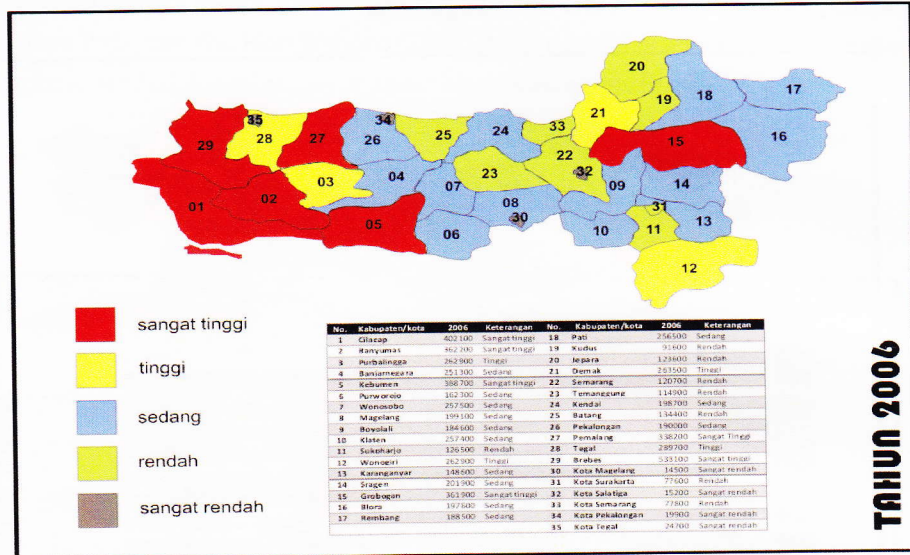
Sumber : Data sekunder diolah

Gambar 4
Klasifikasi Intensitas Berdasarkan Distribusi
Tahun 2005



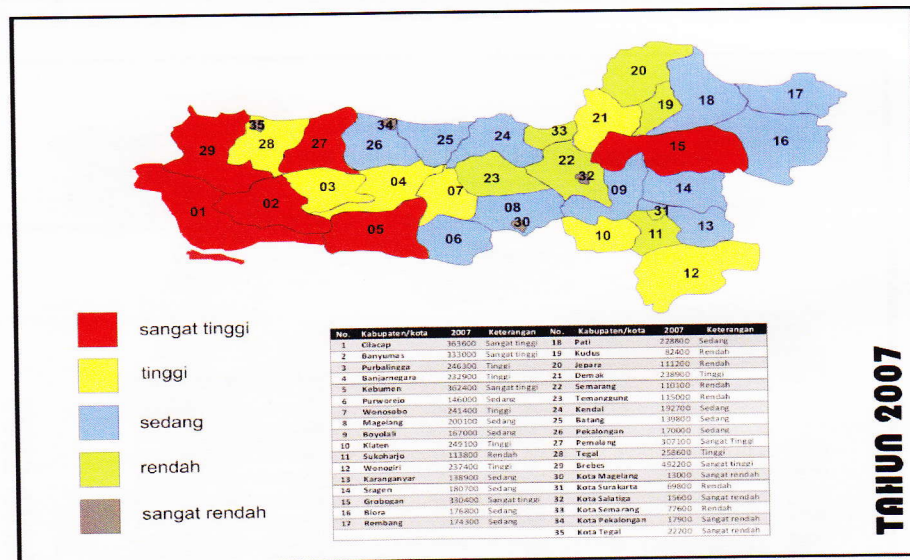
Sumber : Data sekunder diolah

Gambar 5
Klasifikasi Intensitas Berdasarkan Distribusi
Tahun 2006



Sumber : Data sekunder diolah

Gambar 6
Klasifikasi Intensitas Berdasarkan Distribusi
Tahun 2007



Sumber : Data sekunder diolah

Konsentrasi Kemiskinan

Konsentrasi kemiskinan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Indeks Entropy Theil, dengan menggunakan pangsa jumlah penduduk sebagai pembobot (weights). Nilai indeks entropy yang lebih rendah menunjukkan kesenjangan yang lebih rendah, dan sebaliknya. (Mudrajad Kuncoro, 2002).

Kelebihan Indeks Entropy Theil dibandingkan dengan indeks konsentrasi spasial lainnya adalah bahwa pada suatu titik waktu, indeks menyediakan ukuran derajat konsentrasi (ataupun dispersi) distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub daerah dalam suatu negara. (Mudrajat Kuncoro, 2001 dalam Diana Wijayanti dan Heri Wahono, 2005).

Hasil perhitungan konsentrasi kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6
Indeks Entropy Theil 2002-2007

Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cilacap	2,636	2,626	2,726	3,055	3,161	3,082
Banyumas	2,485	2,490	2,580	2,758	2,831	2,818
Purbalingga	2,093	2,259	2,335	2,294	2,213	2,254
Banjarnegara	2,045	1,949	2,027	2,142	2,064	2,074
Kebumen	3,002	3,150	3,248	3,195	3,276	3,317
Purworejo	1,326	1,412	1,360	1,338	1,244	1,204
Wonosobo	2,076	2,163	2,266	2,223	2,202	2,246
Magelang	1,587	1,447	1,355	1,329	1,411	1,574
Boyolali	1,352	1,266	1,310	1,286	1,364	1,329
Klaten	2,156	2,121	2,144	2,106	1,978	2,103
Sukoharjo	0,909	0,852	0,832	0,814	0,868	0,838
Wonogiri	1,864	1,927	2,023	2,160	2,112	2,055
Karanganyar	0,907	1,029	0,968	1,006	1,076	1,093
Sragen	1,922	1,908	1,883	1,770	1,565	1,506
Grobogan	3,214	3,178	3,321	3,258	2,924	2,882
Blora	1,680	1,527	1,545	1,489	1,536	1,477
Rembang	1,543	1,586	1,643	1,613	1,597	1,601
Pati	1,938	1,872	1,946	1,909	1,951	1,868
Kudus	0,558	0,593	0,559	0,547	0,577	0,556
Jepara	0,609	0,635	0,646	0,726	0,772	0,744
Demak	1,826	2,001	2,154	2,107	2,096	2,047
Semarang	1,010	0,838	0,841	0,826	0,793	0,779
Temanggung	0,745	0,766	0,768	0,753	0,803	0,892
Kendal	1,522	1,580	1,461	1,434	1,501	1,595
Batang	1,145	1,093	1,021	1,001	0,993	1,158
Pekalongan	1,651	1,556	1,437	1,408	1,457	1,399
Pemalang	2,491	2,516	2,399	2,551	2,669	2,609
Tegal	2,294	2,360	2,329	2,282	2,162	2,072
Brebes	4,708	4,688	4,474	4,388	4,415	4,415
Kota Magelang	0,104	0,122	0,122	0,118	0,089	0,085
Kota Surakarta	0,443	0,505	0,483	0,503	0,528	0,510
Kota Salatiga	0,122	0,117	0,099	0,095	0,086	0,099
Kota Semarang	0,511	0,472	0,391	0,270	0,355	0,395
Kota Pekalongan	0,148	0,113	0,100	0,097	0,104	0,101
Kota Tegal	0,198	0,137	0,142	0,138	0,148	0,143
Jumlah	54,817	54,852	54,935	54,989	54,921	54,916

Berdasarkan pada tabel di atas, selama tahun penelitian terdapat daerah yang memiliki kecenderungan turun ketimpangannya, tetapi ada banyak daerah yang memiliki kecenderungan naik ketimpangannya. Untuk daerah yang memiliki kecenderungan ketimpangan yang meningkat, mengindikasikan bahwa ketimpangan di daerah tersebut semakin besar. Sedangkan daerah yang nilai indeksnya kecil dibandingkan dengan daerah lain, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangannya kecil.

Selain mengetahui sebaran penduduk miskinnya dan ketimpangan di suatu daerah, maka suatu daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Klasifikasi ini dikenal dengan tipologi klassen. Dengan tipologi daerah, maka suatu daerah dapat dibagi empat kuadran klasifikasi daerah yaitu :

1. Daerah yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran daerah dengan laju pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan memiliki pertumbuhan PDRB per kapita (g_{ki}) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g_k). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i > g$ dan $g_{ki} > g_k$.
2. Daerah maju tapi tertekan (Kuadran II). Daerah yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi memiliki pertumbuhan PDRB per kapita (g_{ki}) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g_k). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i < g$ dan $g_{ki} > g_k$.
3. Daerah relatif tertinggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh daerah yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan sekaligus pertumbuhan PDRB per kapita (g_{ki}) yang lebih kecil dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g_k).
4. Daerah yang masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran untuk daerah yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi pertumbuhan PDRB per kapita daerah tersebut (g_{ki}) lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g_k). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i > g$ dan $g_{ki} < g_k$. (<http://www.scribd.com/doc/2908449/Modul-4-Tipologi-Klassen>).

Tabel 7
Laju Pertumbuhan PDRB dan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah 2002-2007

Kab/Kota	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-Rata
Kab. Cilacap	6.67	4.54	4.93	5.33	4.72	4.87	5.18
Kab. Banyumas	3.27	3.71	4.17	3.21	4.48	5.30	4.02
Kab. Purbalingga	3.23	3.16	3.34	4.18	5.06	6.19	4.19
Kab. Banjarnegara	0.95	2.96	3.81	3.95	4.35	5.01	3.50
Kab. Kebumen	3.24	2.93	1.18	3.20	4.08	4.52	3.19
Kab. Purworejo	3.45	3.64	4.17	4.85	5.23	6.08	4.57
Kab. Wonosobo	1.99	2.28	2.34	3.19	3.23	3.58	2.77
Kab. Magelang	4.59	4.01	4.03	4.62	4.91	5.21	4.56
Kab. Boyolali	2.59	4.86	3.42	4.08	4.19	4.08	3.87
Kab. Klaten	3.91	4.94	4.86	4.59	2.30	3.31	3.99
Kab. Sukoharjo	3.08	3.97	4.33	4.11	4.53	5.11	4.19
Kab. Wonogiri	3.62	2.53	4.10	4.31	4.07	5.07	3.95
Kab. Karanganyar	4.50	5.63	5.98	5.49	5.08	5.74	5.41
Kab. Sragen	2.39	3.63	4.93	5.16	5.18	5.73	4.50
Kab. Grobogan	3.26	2.20	3.78	4.74	4.00	4.37	3.72
Kab. Blora	2.87	3.28	3.75	4.07	3.85	3.95	3.63
Kab. Rembang	5.80	3.01	4.53	3.56	5.53	3.81	4.37
Kab. Pati	2.78	-2.12	4.25	3.94	4.45	5.19	3.08
Kab. Kudus	2.47	5.56	8.70	4.40	2.48	3.23	4.47
Kab. Jepara	3.92	3.76	4.00	4.23	4.19	4.74	4.14
Kab. Demak	2.68	2.83	3.40	3.86	4.02	4.15	3.49
Kab. Semarang	10.77	3.75	1.46	3.11	3.81	4.72	4.60
Kab. Temanggung	3.38	3.37	3.92	3.99	3.31	4.03	3.67
Kab. Kendal	3.23	2.85	2.61	2.63	3.66	4.28	3.21
Kab. Batang	2.00	2.55	2.07	2.80	2.51	3.49	2.57
Kab. Pekalongan	2.91	3.66	4.39	3.98	4.21	4.59	3.96
Kab. Pemasang	3.38	3.35	3.84	4.05	3.72	4.47	3.80
Kab. Tegal	5.19	5.54	5.29	4.72	5.19	5.51	5.24
Kab. Brebes	5.16	4.86	4.83	4.80	4.71	4.79	4.86
Kota Magelang	3.01	3.74	3.71	4.33	2.44	5.17	3.73
Kota Surakarta	4.97	6.11	5.80	5.15	5.43	5.82	5.55
Kota Salatiga	3.88	4.25	4.24	4.15	4.17	5.39	4.35
Kota Semarang	5.45	4.04	4.12	5.14	5.71	5.98	5.07
Kota Pekalongan	3.22	3.86	4.07	3.82	3.06	3.80	3.64
Kota Tegal	5.09	5.82	5.85	4.87	5.15	5.21	5.33
Jateng	4.19	3.90	4.45	4.38	4.32	4.82	4.34

Sumber : BPS, diolah

Tabel 8
Pendapatan Perkapita dan Rata-rata Pendapatan Perkapita
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah 2002-2007

Kab/Kota	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata
Kab. Cilacap	5.3838	5.59052	5.819714	6.059661	6.551252	6.86361	6.044759
Kab. Banyumas	2.192403	2.229402	2.302769	2.349228	2.522061	2.646187	2.373675
Kab. Purbalingga	2.174112	2.107542	2.157539	2.225481	2.471848	2.608376	2.290816
Kab. Banjarnegara	2.416652	2.386754	2.45656	2.519715	2.764666	2.888146	2.572082
Kab. Kebumen	1.870403	1.896663	1.908034	1.956486	2.045176	2.12793	1.967449
Kab. Purworejo	2.907821	2.996082	3.119039	3.26058	3.405066	3.602377	3.215161
Kab. Wonosobo	1.936013	1.959168	1.978588	2.013475	2.155371	2.225669	2.044714
Kab. Magelang	2.542632	2.610558	2.686665	2.7752	2.952887	3.08509	2.775505
Kab. Boyolali	3.378051	3.468716	3.563213	3.670321	3.879592	4.018207	3.663017
Kab. Klaten	3.094261	3.384036	3.52543	3.650052	3.777233	3.89306	3.554012
Kab. Sukoharjo	4.365744	4.49343	4.613479	4.702969	5.064096	5.284141	4.753976
Kab. Wonogiri	2.240101	2.227273	2.312274	2.404726	2.583604	2.71093	2.413151
Kab. Karanganyar	4.509035	4.614394	4.839254	5.020384	5.504414	5.778118	5.044266
Kab. Sragen	2.372521	2.447171	2.558722	2.681458	2.852484	3.010445	2.6538
Kab. Grobogan	1.800026	1.826484	1.873772	1.932945	2.034814	2.110729	1.929795
Kab. Blora	1.831813	1.880257	1.936664	1.996213	2.1006	2.177959	1.987251
Kab. Rembang	2.890997	2.925677	3.028288	3.103006	3.374785	3.491053	3.135634
Kab. Pati	2.904633	2.805192	2.899414	2.974298	3.235894	3.396703	3.036022
Kab. Kudus	12.37428	12.70607	13.67373	14.02327	14.27186	14.53708	13.59771
Kab. Jepara	3.033914	3.041014	3.107643	3.165557	3.359013	3.467372	3.195752
Kab. Demak	2.215979	2.245236	2.277068	2.306382	2.398183	2.611077	2.342321
Kab. Semarang	4.901776	4.868558	4.907952	5.012604	5.221745	5.410191	5.053804
Kab. Temanggung	2.510768	2.655408	2.720672	2.779389	2.964448	3.058053	2.781456
Kab. Kendal	4.594747	4.604376	4.698082	4.765536	4.790086	4.928583	4.730235
Kab. Batang	2.71863	2.714756	2.736408	2.768646	2.990898	3.082849	2.835364
Kab. Pekalongan	2.820997	2.886943	2.970151	3.029006	3.234705	3.357724	3.049921
Kab. Pemasang	1.840634	1.941246	1.982491	2.013387	2.130821	2.202651	2.018538
Kab. Tegal	1.712129	1.78258	1.854884	1.909761	2.100604	2.210953	1.928485
Kab. Brebes	2.182453	2.243293	2.324716	2.395682	2.577758	2.685422	2.401554
Kota Magelang	6.715673	6.797584	6.811486	6.717259	6.922287	7.157552	6.85364
Kota Surakarta	6.695563	7.143707	7.263885	7.217738	7.930485	8.316547	7.427988
Kota Salatiga	3.912163	4.206427	4.202272	4.103405	4.392164	4.537407	4.22564
Kota Semarang	9.765493	10.64695	10.95314	11.27891	11.65892	12.18735	11.0818
Kota Pekalongan	5.703692	5.801987	5.989013	5.988217	6.450898	6.65833	6.098689
Kota Tegal	3.586074	3.73142	3.971375	4.017523	4.41143	4.625357	4.057197
Jateng	3.447483	3.56861	3.660004	3.761091	4.005732	4.179536	3.770409

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan PDRB dan rata-rata pendapatan perkapita, maka tipologi Kelasennya adalah :

Tabel 9
Tipologi Klassen

Laju pertumbuhan PDRB (4,34 %)	Kuadran IV (Berkembang Cepat)	Kuadran I (Cepat Maju dan Cepat Tumbuh)
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Purworejo • Kab. Magelang • Kab. Sragen • Kab. Rembang • Kab. Tegal • Kab. Brebes 	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Cilacap • Kab. Karanganyar • Kab. Kudus • Kab. Semarang • Kota Surakarta • Kota Salatiga • Kota Semarang • Kota Tegal
	Kuadran III (Relatif Tertinggal)	Kuadran II (Maju tapi Tertekan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Banyumas • Kab. Purbalingga • Kab. Banjarnegara • Kab. Kebumen • Kab. Wonosobo • Kab. Boyolali • Kab. Klaten • Kab. Wonogiri • Kab. Grobogan • Kab. Blora • Kab. Pati • Kab. Jepara • Kab. Demak • Kab. Temanggung • Kab. Batang • Kab. Pekalongan • Kab. Pemalang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Sukoharjo • Kab. Kendal • Kota Magelang • Kota Pekalongan
	PDRB/kapita (Rp 3.770.409/kap)	

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan tipologi Klassen, ada 17 kabupaten di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori relatif tertinggal, di mana kabupaten tersebut secara rata-rata laju pertumbuhan PDRB-nya dibawah rata-rata laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dan rata-rata PDRB perkapitanya juga dibawah rata-rata PDRB/kapita Jawa Tengah. Hal ini juga terlihat dari klasifikasi intensitas berdasarkan distribusi penduduk miskin masuk kategori dari sedang sampai sangat tinggi dan nilai indeks entropinya menunjukkan kecenderungan yang meningkat dan tinggi. Artinya, bahwa pada daerah yang relatif tertinggal, sebaran penduduk miskin dan ketimpangannya juga tinggi.

Sedangkan daerah yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan PDRB-nya di atas rata-rata laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dan rata-rata PDRB perkapitanya juga di atas rata-rata PDRB/kapita Jawa Tengah, masuk klasifikasi cepat maju dan cepat tumbuh. Dan ini mayoritas dicapai oleh daerah perkotaan. Walaupun ada daerah perkotaan yang rata-rata laju pertumbuhan PDRB-nya di bawah rata-rata laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah. Hal ini juga terlihat dari klasifikasi intensitas berdasarkan distribusi penduduk miskin masuk kategori dari rendah sampai sangat rendah dan nilai indeks entropinya menunjukkan kecenderungan yang menurun dan kecil. Artinya, bahwa pada daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, sebaran penduduk miskin dan ketimpangannya juga rendah. Akan tetapi ada sesuatu yang menarik dari Kabupaten Cilacap, meskipun dari tipologi Klassen masuk daerah cepat maju dan cepat tumbuh, tetapi sebaran penduduk miskin dan ketimpangannya sangat tinggi. Hal ini dikarenakan peranan sektor pembentuk PDRB tidak merata (sangat timpang), dan sektor perdagangan yang mempunyai peranan sebesar 23,76 % pada tahun 2007 tidak dapat memberikan andil (*trickle down effect*) pada sektor yang lain.

Daerah yang masuk klasifikasi daerah berkembang cepat mayoritas sebaran penduduk miskinnya sedang hanya Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes yang sebaran penduduk miskinnya masuk kategori tinggi dan sangat tinggi. Namun demikian rata-rata laju pertumbuhan PDRB-nya di atas rata-rata laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah. Peranan masing-masing sektor pembentuk PDRB kecil tetapi untuk Kabupaten Brebes peran sektor pertanian cukup tinggi yaitu 9,93 %.

Daerah yang masuk klasifikasi daerah maju tertekan rata-rata laju pertumbuhan PDRB-nya dibawah rata-rata laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah tetapi rata-rata PDRB perkapitanya juga di atas rata-rata PDRB/kapita Jawa Tengah. Sebaran penduduk miskinnya dari sedang sampai sangat rendah dan ketimpangannya juga rendah.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pada klasifikasi intensitas berdasarkan distribusi, menunjukkan bahwa di Jawa Tengah ada beberapa daerah yang masuk dalam klasifikasi tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini menunjukkan masih banyak penduduk miskin di beberapa daerah tersebut. Bahkan ada beberapa daerah pada saat awal penelitian, masuk dalam klasifikasi sedang, tetapi pada akhir penelitian masuk dalam klasifikasi tinggi. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut meningkat. Berdasarkan perhitungan dengan indeks Entropi Theil, menunjukkan bahwa di Jawa Tengah terjadi konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. Daerah yang sektor industri dan pariwisatanya maju maka akan memiliki nilai indeks yang kecil. Sedangkan daerah yang tidak didukung oleh sektor industri, maka nilai indeksnya besar. Nilai indeks yang kecil menunjukkan ketimpangannya kecil (semakin merata) dan nilai indeks yang besar menunjukkan ketimpangan yang besar. Mayoritas daerah kota lebih maju dibandingkan dengan kabupaten. Hal ini sesuai pendapat Perroux (1988) dalam Mudrajad Kuncoro (2004) yaitu bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Saran

Perencanaan pembangunan daerah di Jawa Tengah diarahkan bagi daerah-daerah yang relatif tertinggal serta sebaran penduduk miskin yang tinggi. Dilakukan penyebaran kegiatan-kegiatan ekonomi ke seluruh daerah di Jawa Tengah, sehingga mendorong persebaran penduduk ke seluruh wilayah di Jawa Tengah dan meningkatkan tingkat produktivitas penduduk.

Daftar Pustaka

- Achmad Firman dan Linda Herlina. 2004. Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Peternak Sapi Perah (Survey di Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa Sinar Jaya Kabupaten Bandung). Available at : <http://www.google.com>.
- Anonim. Modul 4. Tipologi Klassen. 2008. Available at : <http://www.scribd.com/doc/2908449/Modul-4-Tipologi-Klassen>.
- BPS.2007. Jawa Tengah Dalam Angka 2007.
- Diana Wijayanti dan Heri Wahono. 2005. Analisis Konsentrasi Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 1999-2003. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 3, Desember 2005, Hal : 215-225.
- Dian Octaviani. 2001. Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke. Media Ekonomi Vol. 7 No. 2 Agustus 2001, Hal : 100-108.
- R. Abdul Haris. 2007. Analisis Pengaruh Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan di Daerah Pesisir Pantai Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Jurnal Eksekutif Vol. 4 No. 1, April 2007, Hal : 49 – 54.
- Samsubar Saleh. 2002. Faktor-faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 7 No. 2, 2002, Hal : 87-102.
- Sunarwan Arif Wicaksana, 2007, Analisis Kesenjangan Kemiskinan Antar Propinsi di Indonesia Periode Tahun 2000-2004. Skripsi FE UII (tidak dipublikasikan).
- Suparmono. 2004. Pengantar Ekonomika Makro. Teori, Soal dan Penyelesaiannya. Yogyakarta : UPP AMPYKAPN.
- Sutarno dan Mudrajad Kuncoro. 2003. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1999-2000. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 8, No 2 (2003), Hal : 97- 110.
- Thia Jasina, dkk. 2001. Analisa Peringkat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLIX Nomor 4.
- Mubyarto. 2002. Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat Th. 1-No. 9- November 2002.
- Mudrajad Kuncoro. 2002. Analisis Spasial dan Regional : Aglomerasi dan Kluster Indonesia. Yogyakarta : UPPAMPYKPN.

Mudrajad Kuncoro. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Tulus Tambunan. 2001. Perekonomian Indonesia : Beberapa Masalah Penting. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.